

**PROSES PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGGELOPAN NASKAH UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI-4**

NGAWI TAHUN AJARAN 2006/2007

(Studi Kasus Perkara Pidana No.197/Pid.B/2007

Di Pengadilan Negeri Ngawi)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

NIKEN SENDARI PUTRI
C 100 060 165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat drajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia diseluruh dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hal tersebut tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertitik tolak dari hal tersebut pemerintah mengadakan program pendidikan nasional, Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah dari dua puluh persen anggaran pendapatan baik pusat atau pun daerah guna memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat. Untuk melaksanakan amanat Pasal 31 UUD 1945 tersebut, maka di dalam Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ditegakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Program wajib belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah merupakan realisasi pembangunan Indonesia seutuhnya dan

¹ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati , *Ilmu Pendidikan* ,Jakarta:Rineka Cipta,1991,hal 190

setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang dijamin penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kebijakan ini memberikan makna bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Untuk meningkatkan mutu Sisdiknas, maka pemerintah mengadakan sistem Kelulusan dengan Ujian Akhir Nasional (UAN). Adanya Sistem UAN tersebut, menjadi salah satu beban bagi peserta didik untuk dapat mencapai standard kelulusan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan demi meningkatkan mutu SDM dan pendidikan nasional dengan menaikan standard nilai kelulusan UAN di setiap tahunnya. Pada tahun 2010 ini misalnya, nilai standard lulus UAN pada tahun ini lebih tinggi dan seleksinya lebih ketat dari tahun sebelumnya. Standard nilai kelulusan 5,5 dengan 6 mata pelajaran yang diujikan. Pemerintah bahkan berencana soal yang diujikan pada tahun ini sebagian besar dibuat langsung oleh dosen Universitas sebagai salah satu seleksi masuk ke Perguruan Tinggi Negeri.

Setiap sekolah dikoordinir untuk mencapai target dengan mutu nilai standard nasional bagi negara. Kondisi semacam ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya penyimpangan dalam praktik pelaksanaan Ujian Akhir Nasional. Hal ini dilakukan oleh suatu sekolah demi

pencapaian mutu dan pemenuhan kriteria standard nasional dengan hasil akhir diharapkan dapat lulus ujian akhir secara keseluruhan.

Salah satu penyimpangan UAN adalah yang terjadi di SMK PGRI-4 Ngawi. Perbuatan Terdakwa Drs.H. Ma'mun Effendi selaku Kepala Sekolah SMK-PGRI-4 Ngawi, dan beberapa Guru seperti Drs.Fusi Santoso, Bambang Sugeng Winarno, dan Agus Sulaiman, tentunya merusak citra dunia pendidikan karena bertentangan dengan program pemerintah yang sedang aktif meningkatkan mutu pendidikan. Perbuatan Kepala Sekolah dan kawan-kawan yang telah mengambil atau mencuri naskah Ujian Nasional pada tanggal 14 April 2007 di Jl.Ayani Kec.Karangsari Kab.Ngawi, berupa 1 (satu) soal mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 1(satu) kaset Ujian Bahasa Inggris (Listening).

Timbulnya niat terdakwa, diwarnai motif dan tujuan mengambil kesempatan secara spontan dengan harapan bisa menaikkan angka kelulusan dan mengangkat nama baik sekolah SMK PGRI-4 Ngawi dengan presentasi kelulusan yang ditargetkan 96% tanpa niat komersil, hanya dorongan rasa kasihan pada murid dalam menghadapi ujian. Meski demikian, tujuan Kepala Sekolah SMK PGRI Ngawi dan kawan-kawan untuk membocorkan soal ujian akhir nasional ini termasuk tindakan yang melawan hukum karena jabatan dan kewenanganya melakukan tindakan membuka rahasia negara.

Sebagai seorang Pendidik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sudah menjadi suatu kewajiban untuk menjaga martabat dan kehormatannya

demikian nama baik sekolah tanpa melanggar norma yang berlaku dengan membocorkan soal UAN. Hal ini juga disebutkan pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian yang mewajibkan pada setiap pegawai Negeri untuk menyimpan rahasia jabatannya. Kewajiban menyimpan rahasia ini tidak perlu berdasarkan atas suatu perjanjian khusus antara orang itu di satu pihak dan pengurus perusahaan di lain pihak, akan tetapi cukup apabila orang itu tahu bahwa sewajarnya rahasia itu harus disimpan.²

Pegawai Negeri sipil pada hakikatnya memiliki tanggung jawab bahwa apabila pegawai negeri itu lalai hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi negara, maka mereka harus mempertanggung jawabkan kelalaiannya itu.³ Atas dasar hal tersebut Penulis ingin meneliti tentang pertanggung jawaban terhadap kelalaiannya itu dan proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana penggelapan naskah ujian akhir nasional tahun ajaran 2006/2007 yang terjadi di SMK PGRI- 4 Ngawi.

Penyelesaian kasus penggelapan naskah ujian ini, diatur dalam hukum acara pidana berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Merujuk pada hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang proses penyelesaian hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penggelapan soal UAN dengan Nomor perkara 197/Pid.B/2007/P.N.Ngw yang telah diputus dalam Rapat

² M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung :Remadja Karya, 1998, hal 158

³ Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 5

Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007 oleh Hakim ketua Majelis Gatot Susanto, SH; Zulkifli, SH.MH; dan Riyanti Desiwati, SH sebagai hakim anggota. Putusan dimaksud dibacakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2007 di mana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama, yang melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP di Pengadilan Negeri Ngawi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) yang berkaitan dengan hukum acara pidana dengan judul: ” PROSES PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGELAPAN NASKAH UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI- 4 NGAWI TAHUN AJARAN 2006/2007 (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NO.197/Pid.B/2007 DI PENGADILAN NEGERI NGAWI) ”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana penggelapan naskah ujian akhir nasional SMK PGRI-4 Ngawi tahun ajaran 2006/2007?
2. Apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam

tindak pidana penggelapan naskah ujian akhir nasional SMK PGRI-4
Ngawi tahun ajaran 2006/2007 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan.⁴ Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana penggelapan naskah ujian akhir nasional SMK PGRI- 4 Ngawi tahun ajaran ajaran 2006/2007.
 - b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggelapan naskah ujian akhir nasional SMK PGRI-4 Ngawi tahun ajaran 2006/2007.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
 - b. Menambah pengetahuan dan mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum mengenai proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana di bidang pendidikan.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal 11

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses penyelesaian hukum khususnya dalam kasus tindak pidana Penggelapan naskah UAN di SMK-4 PGRI Ngawi.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan dan sumbangan informasi kepada masyarakat tentang proses penyelesaian hukum terhadap suatu perkara pidana dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kasus penggelapan naskah UAN.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum dan Depdiknas agar dapat menjadi koreksi tentang penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus penggelapan dan pembocoran naskah UAN.

E. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan

oleh fakta tersebut.⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.⁶

Agar menghasilkan data dan analisis yang maksimal, maka digunakan metode penelitian. Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari, dan memahami, keadaan-keadaan yang dihadapi. Sehingga Metode Penelitian itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana mempunyai maksud untuk mengkaji aspek yuridis dan empiris dalam penyelesaian kasus penggelapan naskah UAN SMK PGRI-4 Ngawi yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau obyek penelitian sebagaimana adanya.⁷ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran mengenai proses penyelesaian hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, hal 2

⁶ Sutrisno hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi, UGM, 1983, hal 4

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal.12

dalam perkara tentang tindak pidana penggelapan naskah UAN SMK PGRI-4 Ngawi yang di lakukan secara bersama-sama.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2006/2007 terjadi penggelapan naskah UAN yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Ngawi.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi data primer dan sumber data skunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari Penelitian di Pengadilan Negeri Ngawi, khususnya berkaitan dengan kasus penggelapan soal UAN yang terjadi di SMK PGRI-4 Ngawi.

b. Data skunder

Data skunder berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi meliputi bahan pustaka yaitu:

1). Bahan hukum primer terdiri dari:

a. Undang- Undang yaitu:

(1) Undang-undang Dasar 1945

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(3) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana

(4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional

(5) Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok

Kepegawaian

b. Peraturan Perundangan lainnya.

c. Putusan

2). Bahan hukum Sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan hukum acara pidana khususnya tentang proses penyelesaian hukum tindak pidana di bidang kependidikan, sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

3). Bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang dapat memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang terdiri dari kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Ngawi untuk memperoleh data primer, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data adalah analisis data, yang merupakan faktor penting dalam hal turut menentukan kualitas hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi, dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum dalam perkara NO.197/Pid.B/2007/PN.Ngw tentang kasus penggelapan naskah UAN yang terjadi di SMK PGRI-4 Ngawi. Dan dianalisis secara kualitatif, akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam empat bab.

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II berisi tinjauan pustaka, di sini Penulis menguraikan tinjauan umum tentang proses penyelesaian perkara pidana, tinjauan umum tentang pembocoran soal Ujian Akhir Nasional, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, dan tinjauan umum tentang penyertaan.

Bab III berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Di sini diuraikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana dalam kasus NO.197/Pid.B/2007/PN.Ngw tentang penggelapan soal UAN yang terjadi di SMK PGRI-4 Ngawi, dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan .

Bab IV berisi penutup, dimana Penulis menguraikan kesimpulan dan saran serta ditambahkan daftar pustaka dan lampiran.